

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN KHUSUS TERHADAP BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA**

**William Gani
Septian Bayu Kristanto**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana
Jl. Tanjung Duren Raya No.4, Jakarta Barat, 11470
Email: septian.bayu@ukrida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to test the effect of the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund Expenditure (DAK) that occurs in the district/city on the island of Sumatra, on Government Expenditure. The data was taken from the budget statement and income statement of 2007, which was obtained from 55 districts/cities.

The results of the analysis indicate that there was significant effect of the DAU and DAK on government expenditure. The impact of this research was expected to be a smarter government in regulating local spending especially related to APBN and APBD.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Government Expenditure, and Budget Statement*

PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan reformasi di bidang pemerintah daerah (pemda) dan pengelolaan keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi.

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemda mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 22

tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal (Khusaini 2006) yaitu:

1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi ini mencakup kewenangan dalam penyelenggaraan (pengelolaan) pemerintahan termasuk dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, *control*, dan evaluasi.
2. Otonomi yang nyata, berarti bahwa daerah lebih leluasa dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.

4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu:
- Kewenangan lintas kabupaten/kota;
 - Kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
 - Kewenangan lainnya menurut PP No.25 tahun 2000.

Sejak era reformasi Pemerintah Indonesia telah menetapkan otonomi daerah yang merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah tentang anggaran pembelanjaan daerah yang menjadi kewenangan dari pemda terbagi atas dua dana yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan sumber keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise 2008). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, peranan dana alokasi umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan masing-masing daerah.

Pada kenyataannya, dana alokasi umum masih menjadi primadona dibandingkan dengan pembiayaan daerah karena PAD dan pinjaman belum dapat diandalkan. Padahal seharusnya PAD yang digunakan untuk membangun daerah agar banyak untuk investasi pada daerah tersebut,

sehingga pendapatan daerahnya dapat digunakan untuk membiayai dan pembelanjaan daerah. Pembelanjaan daerah terbagi menjadi dua yaitu pembelanjaan operasional serta pembelanjaan modal. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana karena masih menggantungkan dengan adanya dana dari pemerintah pusat.

Permasalahan dana alokasi umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang dana alokasi umum. Bagi pusat, dana alokasi umum dijadikan sebagai pemerataan atau mengisi *fiscal gap* (kesenjangan fiskal). Bagi daerah, dana alokasi umum dimaksudkan mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan dana alokasi khusus dipakai untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan prioritas pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemda. Permasalahan yang timbul adalah anggaran pengeluaran daerah yang mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah?
- Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja daerah?

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Anggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (Freeman dan Shoulders, 2003). Anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang. Menurut Lee, Jr dan Johnson (1998), anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup

informasi keuangan, belanja, aktivitas, serta tujuan organisasi.

Mardiasmo (2005) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sementara itu menurut Bastian (2006), berpendapat bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil.

DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pemerataan. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk dalam pengertian ini adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemda di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan suatu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penggunaan dana alokasi umum ditentukan oleh daerah. Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBN harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dana alokasi umum bagi masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot dari daerah yang

bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot seluruh daerah di Indonesia.

Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, yang berarti daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh bagian DAU yang relatif kecil, demikian pula sebaliknya. Dana alokasi umum dapat dikategorikan sebagai *unconditional grant* yakni transfer tak bersyarat dan juga sebagai *blok grant* yaitu jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu.

Dana alokasi khusus dimaksudkan membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Belanja Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2002: 73), penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi aset, atau terjadinya utang berdampak pada berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana. Belanja daerah terdiri 3 komponen yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan yang meski disusun hampir bersamaan tetapi dibuat di lembaga yang berbeda.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang berupa arus kas aktiva keluar, deplesi aktiva atau timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada milik ekuitas dana (rakyat).

Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 bagian utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan

dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya (Syaiful, 2006). Jumlah nilai belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

Menurut Priyo (2009), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung kepada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari sendiri maupun yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja maka terdapat ilusi fiskal.

Penelitian ini mengacu penelitian sebelumnya yaitu penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi studi kasus pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Barat. Pada Maryati dan Endrawati (2010), fenomena yang diutamakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel terikat (*dependend variable*) dalam penelitian sebelumnya adalah pertumbuhan ekonomi. Adapun variabel bebasnya (*independend variable*) adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Regresi linear berganda digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis pada penelitian sebelumnya dan juga untuk menguji hipotesis pada penelitian sebelumnya digunakan statistik deskriptif yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, *variance*, *maximum* dan *minimum*.

Hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yaitu: pertama, hasil pengujian dari hipotesis alternatif pertama dan kedua adalah diterima, artinya besarnya nilai DAU dan PAD secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (pengaruh positif). Kedua, hasil pengujian hipotesis alternatif ketiga yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah DAK berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak diterima karena tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

H2 : Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari laporan realisasi APBD Pemda Kabupaten/Kota provinsi di Pulau Sumatera tahun 2007 sampai tahun 2010 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan melalui internet.

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari internet. Data yang digunakan merupakan laporan resmi yang disampaikan oleh masing-masing daerah yang memang diwajibkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pemda dan data tersebut kecil kemungkinan untuk direkayasa dan sebagainya karena data tersebut sudah diaudit dan pemerintah daerah sebagai pemilik dari laporan tersebut tidak akan berani mempermainkan angka-angka yang ada terlalu "senjang" dari angka yang sebenarnya.

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar

pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempengaruhi belanja daerah. Populasi dan sampel dilakukan di pulau Sumatera karena penelitian sebelumnya dilakukan di pulau Jawa.

Variabel dependen penelitian ini adalah belanja daerah. Variabel independen pada penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun cara perhitungannya sebagai berikut:

- a. DAU = Jumlah Dana Alokasi untuk Daerah X _____
- b. Belanja Daerah/Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Barang, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset tetap lainnya.
- c. DAK = perhitungan DAK dapat dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu:
 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Persamaan matematis pada penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ DAU} + \alpha_2 \text{ DAK} + e$$

Dimana:

- Y = Jumlah Belanja Daerah.
 α = Konstanta.
 $\alpha_1 \alpha_2$ = Koefisien Regresi
 DAU = Dana Alokasi Umum.
 DAK = Dana Alokasi Khusus.
 e = Error.

Metode analisis data dalam penelitian ini dimulai dari tahap pengumpulan sampel yang berasal dari laporan realisasi APBD pemda kabupaten/kota yang diambil dari situs Perimbangan Dirjen melalui internet, sehingga dari data tersebut dapat kecil kemungkinan terjadi permainan atau kesalahan yang terlalu senjang karena suda diaudit.

Langkah kedua, statistik deskriptif yaitu mendeskripsikan tiap-tiap variabel. Menurut Ghazali (2005: 16), statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, *variance*, *maximum* dan

minimum. Selanjutnya dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data dalam model regresi apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji normal yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one sample kolmogorov smirnov test* dengan tingkat signifikansi (α)=5%. Jika tingkat signifikansi $> \alpha$, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika tingkat signifikansi $< \alpha$ maka data berdistribusi tidak normal. Langkah terakhir, peneliti melakukan uji asumsi klasik dan uji statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten atau kota di Pulau Sumatera, dengan data DAK, DAU, Belanja Daerah dan Total Belanja Daerah. Data yang terkumpul pada variabel independen dan variabel dependen akan diolah dengan SPSS IBM. 19. Data tersebut adalah data dari 55 kabupaten/kota di Pulau Sumatera, yaitu 10 Kabupaten di Propinsi Nanggore Aceh Darussalam, 10 Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, 8 Kabupaten di Sumatera Barat, 8 Kabupaten di Riau, 4 Kabupaten di Jambi, 5 Kabupaten di Sumatera Selatan, 5 Kabupaten di Bengkulu, dan 5 Kabupaten di Lampung.

Uji Statistik Deskriptif

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk variabel DAU (X1) nilai rata-ratanya sebesar 316,72, sedangkan untuk nilai standar deviasinya sebesar 148,596. Nilai maksimum dan minimumnya yaitu sebesar 0 dan 900. Variabel DAK (X2) nilai rata-ratanya sebesar 38,55, sedangkan untuk nilai standar deviasinya sebesar 17,838. Nilai maksimum dan minimumnya sebesar 0 dan 87. Variabel belanja daerah (Y) memiliki rata-rata 648,63 dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 709,401. Nilai maksimum dan minimumnya yaitu 1 dan 8519.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum*	Mean*	Std. Deviation*
DAU	518	0	900	316,72	148,596
DAK	518	0	87	38,55	17,838
BELANJA	518	1	8519	648,63	709,401
Valid (listwise)	N 518				

* nilai dalam jutaan rupiah

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu distribusi yang menunjukkan sebaran data yang seimbang, yang ditunjukkan sebagian besar data berada pada nilai tengah. Normalitas merupakan syarat keharusan dan pertama pada analisis parametrik dan analisis regresi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik ini tidak valid atau bias terutama untuk sampel kecil. Dari tabel 2 berikut terlihat semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal karena *asympt. sig. (2-tailed)* sebesar 0,177 yang berarti hasil ini lebih besar dari 0,05.

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Belanja
N		518
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	648,63
	Std. Deviation	709,401
Most Extreme Differences	Absolute	,242
	Positive	,242
	Negative	-,232
Kolmogorov-Smirnov Z		5,503
Asymp. Sig. (2-tailed)		,177

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas, dimaksudkan bahwa tidak boleh ada korelasi atau hubungan yang sempurna antara variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Salah satu cara dari beberapa cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan atau melihat *tool* yang disebut *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model dapat dikatakan tidak

terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF < 10, angka ini dilihat pada tabel *coefficients*. Dari tabel 3 berikut dapat ditarik simpulan bahwa model tidak terdapat (tidak terjadi) multikolinearitas antar variabel independen dan kontrol karena VIF masing-masing sebesar 1,005 dan 1005.

Tabel 3
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 DAU	,995	1,005
DAK	,995	1,005

a. Dependent Variable: Belanja

Uji Heteroskedastisitas

Suatu model dikatakan memiliki *problem* heteroskedastisitas apabila ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Untuk melakukan uji ini, ada beberapa metode yang dapat digunakan, salah satunya uji *Park Gleyser*.

Suatu model dapat dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas atau signifikansinya lebih dari 0,05. Dari tabel 4 di atas menunjukkan bahwa probabilitas atau taraf signifikansi masing-masing variabel bernilai 0,168; 0,092; dan 0,826 sehingga dapat dipastikan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	123,692	89,494			1,382	,168
DAU	1,548	,192	,409		8,073	,092
DAK	-,362	1,646	-,011		-,220	,826

a. Dependent Variable: BELANJA

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut

waktu, *cross section* atau *time-series*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Dalam penelitian ini akan digunakan uji autokorelasi dengan menggunakan metode yang paling umum yaitu metode *Durbin-Watson*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu model dapat dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi, jika probabilitas nilai *Durbin-Watson* $> 0,05$. Pada tabel 5 probabilitas nilai *Durbin-Watson* adalah $1,642 > 0,05$, maka dapat dipastikan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi.

Tabel 5
Model Summary^b

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,408 ^a	,166	509,474	1,642

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA

Uji Regresi Berganda

Berdasarkan data pada tabel 6 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 123,692 + 0,409 X_1 - 0,011 X_2 + e$$

Tabel 6
Hasil Perhitungan Persamaan Regresi

Variabel Penelitian	Model	Koefisien Regresi
X1	Dana Alokasi Umum	0,409
X2	Dana Alokasi Khusus	-0,011
Adjusted R Square = 0,161		F _{tabel} = 10,140
Konstanta = 123,692		F _{hitung} = 32,640

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, dapat dijelaskan berikut:

- α = konstanta sebesar 123,692 menunjukkan pengaruh dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika variabel bebas sama dengan nol, maka besarnya total belanja akan konstan yaitu 123,692.
- β_1 = koefisien regresi sebesar 0,409 menunjukkan bahwa tiap kali terjadi perubahan kenaikan satu satuan

dana alokasi umum, maka nilai total belanja akan meningkat sebesar 0,409, dengan asumsi bahwa nilai variabel bebas yang lain adalah konstan.

- β_2 = koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar -0,011 menunjukkan bahwa jika ukuran perusahaan naik sebesar satu satuan maka akan menurunkan total belanja sebesar 0,011 satuan, dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan adalah model yang fit atau tidak fit. Karena $Sig < 0,05$ (tabel 7), maka H_0 ditolak dan H_a diterima pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat diambil simpulan bahwa model yang diajukan tersebut *fit* yang artinya variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel total belanja daerah.

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dapat diketahui dengan melihat koefisien determinasi secara keseluruhan. Dengan *adjusted R_{square}* akan diketahui derajat kemampuan dalam menjelaskan variabel tersebut. Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R_{square}* adalah 0,161, yang berarti bahwa 16,1 persen variabel belanja daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan sisanya 83,9 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 7
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	16944162,992	2	8472081,496	32,640	,000 ^a
Residual	84877376,596	327	259563,843		
Total	1,018E8	329			

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara

individu variabel independen dan variabel terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji (tabel 8), nilai Sig<0.05 maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus dan dana alokasi umum secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Tabel 8.
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	123,692	89,494			1,382	,168
DAU	1,548	,192	,409		8,073	,000
DAK	-,362	1,646	-,011		-,220	,026

a. Dependent Variable: BELANJA

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

- Dana alokasi umum berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah
- Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah.

Saran

Terdapat keterbatasan penelitian yang dialami peneliti dalam penelitian ini yaitu: sampel data yang digunakan hanya 55 Kabupaten dan dalam penelitian ini variabel yang digunakan hanya terbatas pada satu variabel bebas, yaitu Belanja Daerah, dua variabel dependen yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti setelah peneliti melakukan proses penelitian, yaitu: belum dapat tergambar dengan baiknya proksi perilaku pengalokasian sumber daya oleh *agents* dan politisi dikarenakan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD, dibutuhkan pendekatan lain seperti contohnya eksperimen (dengan subjek eksekutif dan legislatif daerah). Penggunaan data laporan realisasi APBD

hanya dengan mengambil totalnya saja dan kurang memberikan informasi akuntansi yang akurat. Untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan data yang berasal dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dengan melihat jumlah dana alokasi khusus yang dibelanjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah Dan "Fiscal Stress" (Sebuah Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol.16. Hal. 346-357.
- Cheng, Benjamin S. 1999. Causaly between taxes and expenditure; Evidence from Latin American Countries. *Jurnal of Economics and finance*. Vol. 23. Hal. 157-165.
- Deddy Supriady Bratakusumah & Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Ediharsi; Werry Darta Taifur; Husna Rosna; dan Syahrudin. 1999. *Praktek Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 6. Hal. 69-113.
- Soeratno. 2009. *Akuntansi Sektor publik*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Maryanti, Endrawati. 2010. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol. 5. Hal. 68-84.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi, Edisi Pertama*, Alih Bahasa Marwata. Salemba Empat. Jakarta.
- Mamasah, DJ. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah (2007). <http://www.djpk.depkeu.go.id/>